

MODEL RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PRINGSEWU

**(Studi Kasus Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh:

WAHID RIZAL

NPM.1331040023

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Oleh :

WAHID RIZAL

Pendidikan gratis yaitu pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik atau orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menuntaskan program wajib belajar yang kemudian disusul pemerintah pusat dengan menaikan biaya satuan BOS (bantuan operasional sekolah). BOS merupakan salah satu bantuan dari pemerintah untuk memenuhi hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang yang sama untuk mengelola satuan pendidikan

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana cara memenuhi kuota pendidikan gratis di desa Bandung Baru ? (2) Bagaimana model resolusi konflik kebijakan pendidikan gratis di desa Bandung Baru? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model resolusi konflik kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Pringsewu (studi kasus desa Bandung Baru kec. Adiluwih). Penelitian ini adalah penelitian (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi yang telah ditentukan. Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun responden dalam penelitian ini adalah kepala pekon desa bandung baru. Metode yang dipakai yaitu metode wawancara dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa desa bandung baru menjadi sebuah model atau acuan dalam memecahkan masalah kebijakan pendidikan gratis, pemerintahan desa Bandung Baru memiliki program pendidikan gratis untuk anak yang kurang mampu agar semua anak dapat mengenyam pendidikan. Dalam pendidikan sangatlah diprioritaskan di desa Bandung Baru. Desa Bandung Baru memberikan biaya pendidikan gratis tersebut dari sebagian pendapatan desa, sehingga anak-anak dapat melanjutkan sekolah ke sekolahan yang dituju.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Endro Suratman Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandar Lampung 3513

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : MODEL RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN
PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PRINGSEWU
(STUDI KASUS DESA BANDUNG BARU KECAMATAN
ADILUWIH)**

Nama : Wahid Rizal
NPM : 1331040023
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan diperthankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 197503172003121003

Pembimbing II

Abdul Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005

Mengetahui

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Nadirsah Hawari, MA
NIP. 197406282008011013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Endro Suratman Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **MODEL RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN
PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PRINGSEWU (Studi Kasus Desa
Bandung Baru Kec. Adiluwih)**, disusun oleh : **WAHID RIZAL, NPM :
1331040023**, Jurusan : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal :
Selasa, 07 Agustus 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Nadirsah Hawari, M.A.

Sekretaris : Angga Natalia, M.I.P

Penguji Utama : Drs. Effendi, M.Hum

Penguji I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Penguji II : Abdul Qohar, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag
NIP. 195808231993031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat." (QS. An-nisa (4):58)¹



¹ Al-Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (CV. Diponegoro, Bandung 1995), h. 69

PERSEMBAHAN

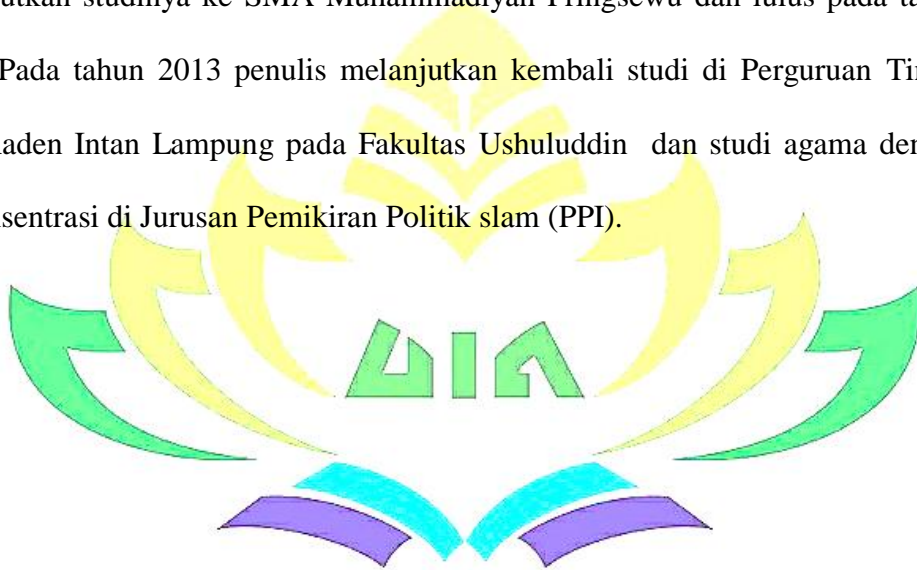
Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta kasih, perhatian serta memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menuntut ilmu.

1. Ayahanda Sujono dan Ibunda Suparmi yang telah mendidik saya sejak kecil hingga dewasa, dan berkat do'a restu keduanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk keduanya.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma. Lc,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan Bapak Dr. Nadirsah Hawari, MA selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam, Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku pembimbing I dan Abdul Qohar, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudara satu perjuangan Rachmat, Rizal, Bagus, Edy, Afen, Aji, Kirwanto, Kuartet, Riki, Rizky dan teman-teman angkatan 2013 jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah mendo'akan, memabntu dan memberi dorongan motivasi dalam penulisan skripsi ini..
4. Almamaterku tercinta Univertas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Suka Agung pada tanggal 09 Juni 1994, anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sujono dan Ibunda Suparmi.

Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis berawal dari SD Negeri 3 Bandung Baru lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukoharjo lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan studinya ke SMA Muhammadiyah Pringsewu dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan kembali studi di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan studi agama dengan berkonsentrasi di Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Azza Wajalla yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, Solawat seiring salam semoga tetap kita limpahkan kepada sosok tauladan dan Peimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti.

Dibalik terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, MA selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam, dan Ibu Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah ikhlas memberikan ilmu dan wawasan selama megikuti perkuliahan.

6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan beserta Staf, yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.
7. Karyawan dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kelancaran penulis sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahannya, hal ini diharapkan saran dan kritik dari pembaca sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih baik dan lebih sempurna.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya pada Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis,

Wahid Rizal
1331040023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
H. Tinjauan Pustaka	14

BAB II RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS

A. Pengertian Konflik	16
B. Resolusi Konflik.....	22
C. Penyelesaian Konflik.....	26
D. Pengertian Kebijakan	30
E. Pengertian Kebijakan Publik.....	31
F. Pengertian Pendidikan.....	35
G. Kebijakan Pendidikan Gratis.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BANDUNG BARU

A. Keadaan Umum Kabupaten Pringsewu.....	45
1. Keadaan Geografis	45
2. Topografi Dan Iklim.....	47
B. Keadaan Umum Kecamatan Adiluwih.....	47
1. Sejarah Desa Bandung Baru.....	48
C. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	50
D. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharin.....	53
E. Keadaan Sarana Dan Prasarana.....	54

BAB IV ANALISIS MODEL RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS

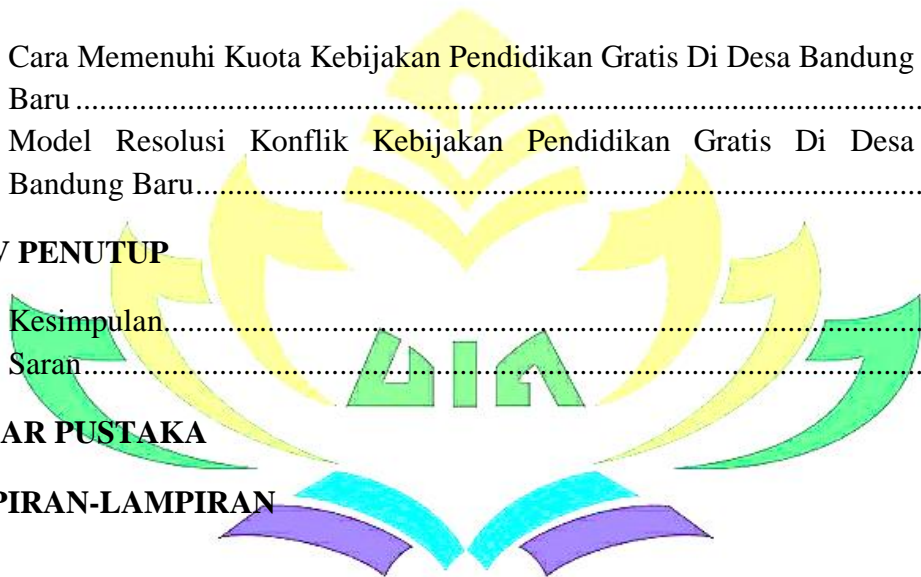
A. Cara Memenuhi Kuota Kebijakan Pendidikan Gratis Di Desa Bandung Baru	56
B. Model Resolusi Konflik Kebijakan Pendidikan Gratis Di Desa Bandung Baru.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Peneliti akan mengajukan skripsi dengan judul *Model Resolusi Konflik Kebijakan Pendidikan Gratis (Study Kasus Desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih)*. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul tersebut maka kiranya peneliti mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci sehingga dapat di mengerti.

Model adalah acuan yang dapat dijadikan contoh untuk menilai sebuah sistem tertentu². Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebut bahwa model berarti pola (ragam, acuan dan sebagainya) dari sebuah hal yang ingin dibuat atau dihasilkan. Jadi model ini adalah sebuah contoh yang paling baik dan dapat mewakili sebuah objek.³

resolusi konflik adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan suatu perbedaan yang memerlukan keterampilan dalam bernegosiasi, berkompromi dan berkeadilan (Mindes : 2006)

Kebijakan merupakan usaha mencapai tujuan dengan sasaran dan dalam urutan tertentu. Sedangkan Kebijakan Pemerintah merupakan suatu keputusan

² Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013), hal. 13

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, University Of California, 2007), hal. 13

yang di buat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum⁴

Pendidikan gratis menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua. Program wajib belajar di selenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya dan ekonomi⁵. Yang di maksud dengan pendidikan gratis yaitu pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik atau orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar dan kegiatan pembangunan sekolah⁶. Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang di lakukan pemerintah daerah dalam rangka menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang kemudian di susul pemerintah pusat dengan menaikkan biaya satuan BOS (bantuan operasional sekolah).

Judul penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dan bagaimana model resolusi konflik kebijakan pendidikan gratis yang ada di Desa Bandung Baru. Kebijakan di bidang pendidikan dengan

⁴ Nurul Ulfatin Dan Teguh Triwiyanto , *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 37.

⁵ Diding Nurdin, Imam Sibaweh, "*Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*". (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 212

⁶ Syarifudin, "*Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*". (Jakarta. Rineka Cipta, 2008). hal. 84

tujuan untuk pemerataan pendidikan, mutu pendidikan dan kesejahteraan anak didik.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan subyektif dan obyektif penulis dalam memilih judul

1. Dari informasi kepala sekolah bahwa kebijakan dalam pendidikan gratis masih ada yang tidak sesuai, masih ada pungutan dana di sekolah, dan keluhan dari kepala sekolah akan minimnya dana dan tersendatnya pencairan dana. maka dari itu penulis ingin mengkaji dan meneliti fenomena tersebut dalam karya ilmiah
2. Penulis mengangkat judul implikasi kebijakan pendidikan gratis karena menyangkut mutu pendidikan dan kesejahteraan anak didik.
3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan pendidikan gratis terhadap mutu pendidikan.

C. Latar Belakang

Kabupaten Pringsewu adalah sebuah kabupaten yang memiliki 9 kecamatan, salah satunya terdapat kecamatan Adi Luwih yang memiliki 13 desa, dari ke 13 desa tersebut ada salah satu desa yang menonjol dalam pendidikan anak-anak nya, karena di desa tersebut termasuk desa yang di kategorikan biasa namun memiliki sebuah program pendidikan gratis untuk anak-anak yang berada di desa tersebut terutama untuk anak kurang mampu. Desa Bandung Baru adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu yang di desa tersebut adalah salah satu desa yang menonjol akan pendidikan nya, karena

pemerintahan desa Bandung memiliki program pendidikan gratis untuk anak yang kurang mampu agar semua anak dapat mengenyam pendidikan. Dalam pendidikan sangatlah diprioritaskan di desa Bandung Baru, karena pendidikan itu penting dan wajib di berikan untuk penerus bangsa.

Desa Bandung Baru memberikan biaya pendidikan gratis tersebut dari sebagian pendapatan desa, sehingga anak-anak dapat melanjutkan sekolah ke sekolahan yang dituju. Dan pendidikan gratis ini telah diatur didalam peraturan desa No 2 Tahun 2015.

Kebijakan pendidikan gratis yang ada di Desa Bandung Baru merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang menganjurkan pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat dan walaupun ada dana bantuan oprasional sekolah (BOS) yang diberikan di sekolah namun, masih saja ada pungutan biaya-biaya untuk anak didik sehingga terasa berat bagi warga Desa Bandung Baru.

BOS merupakan salah satu bantuan dari pemerintah untuk memenuhi hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang yang sama untuk mengelola satuan pendidikan meskipun pengelolaannya oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan pendidikan yang bersifat oprasional menjadi wewenang pemerintah daerah, sedangkan kegiatan oprasional

⁷ Diding Nurdin, Imam Sibaweh, “*Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*”. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 213

dari komponen tersebut mejadi tugas dan kewajiban satuan pendidikan yang tentunya berbeda-beda dalam pelaksanaan oprasionalnya⁸.

Kebijakan pendidikan gratis yang semula untuk membantu meringankan beban masyarakat ternyata pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kebijakan tersebut di nilai belum maksimal karena dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai, adanya pungutan atau penarikan dana di sekolah hingga muncul persepsi yang negatif di mata masyarakat karena banyak masalah pungutan untuk sumbangan guna kepentingan sekolah. Masyarakat di desa Bandung Baru yang mengeluhkan bahwa keebijakan tersebut masih jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan program pendidikan gratis yang di canangkan pemerintah kabupaten Pringsewu serta masih terjadi kesenjangan sosial. Maka pemerintah desa Bandung Baru memberikan bantuan untuk anak-anak yang kurang mampu.

Permasalahan yaitu, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di kabupaten Pringsewu, di antaranya belum semua masyarakat di kabupaten Pringsewu khusunya di kecamatan Adi Luwih dapat mengenyam bangku pendidikan dengan alasan kurangnya perekonomian mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah di sebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang.⁹ Namun, pada realitanya tidak semua warga indonesia dapat mengakses pendidikan secara merata. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang merata, Pemerintah kabupaten Pringsewu memiliki

⁸ *Ibid*, hal. 214

⁹ PP UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta, Visimedia, 2007), hal. 5

program pendidikan gratis bagi seluruh warganya sesuai dengan peraturan daerah Undang-Undang No. 6 tahun 2013 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis bahwasanya program pendidikan gratis merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan layanan dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata sebagai upaya dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, terampil dan beriman bagi seluruh lapisan masyarakat kabupaten Pringsewu.¹⁰

Kondisi perekonomian masyarakat desa Adiluwih yang masih rendah dan tingginya biaya pendidikan menyebabkan pemerataan memperoleh pendidikan semakin rendah. Mengetahui hal seperti ini, pemerintah kabupaten Pringsewu mengambil tindakan konkrit dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis pada tahun 2007 bagi sekolah dasar yang membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar iuran bulanan serta iuran pengembangan sekolah. Kemudian pada tahun 2008 di perluas bagi siswa sekolah menengah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar pendidikan menengah.

Konsep pendidikan di Indonesia secara ketentuan telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

¹⁰ PP UU No 6 Tahun 2013 tentang program penyelenggaraan pendidikan, (Jakarta, Visimedia, 2005), hal. 13

tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab¹¹”

Berdasarkan konsep ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dengan harapan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta kemajuan sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatu negara¹². Persoalan yang dihadapi, bahwa sistem pendidikan di Indonesia walaupun dalam ketentuan sudah memiliki landasan yang kuat, tetapi pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kebijakan pendidikan gratis yang ada di beberapa kecamatan berada di Pringsewu seperti kecamatan Gading Rejo dan Pagelaran yang notabene kecamatan tersebut kecamatan yang lebih maju namun dalam kebijakan gratis yang diberikan tidak seperti kecamatan Adi Luwih terutama desa Bandung Baru yang memberikan pendidikan penuh bagi anak-anak yang kurang mampu dan

¹¹ Diding Nurdin, Imam Sibaweh, “*Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*”. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 138

¹² *Ibid*, hal. 139

berprestasi di desa nya. Desa Bandung Baru termasuk desa yang maju sehingga pendapatannya dapat di alokasikan ke pendidikan.

Gambaran latar belakang diatas memberikan deskripsi singkat mengenai model resolusi konflik kebijakan pendidikan gratis yang ada di desa Bandung Baru kecamatan Adi Luwih. Dan memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang ada di masyarakat agar anak-anak bangsa menjadi penerus yang berpendidikan sehingga kita dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi dari kebijakan pendidikan gratis yang sudah ada namun masih saja membebani anak-anak untuk melanjutkan sekolah.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memenuhi kuota pendidikan gratis di desa Bandung Baru ?
2. Bagaimana model resolusi konflik kebijakan pendidikan gratis di desa Bandung Baru?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi kuota pendidikan gratis di desa Bandung Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana model resolusi konflik kebijakan pendidikan gratis di desa Bandung Baru.

F. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang kebijakan pendidikan gratis, sehingga dapat mengembangkan konsep-konsep mengenai kebijakan pendidikan gratis.
2. Secara praktis : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Pringsewu agar daerah tersebut kedepannya lebih baik dan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat.

G. Metode penelitian

Metode penelitian sangat tergantung pada permasalahan dan sifat penelitian sebelum penulis mengemukakan metode penelitian ini, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan metode tersebut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data yang ada di lapangan.

Menurut cholid narbuko dan abu ahmadi penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar

belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.¹³

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan, dalam hal ini ada masalah kemiskinan yang menjadi penghambat dalam meningkatkan pendidikan di kabupaten pringsewu sehingga pemerintah kabupaten pringsewu mengeluarkan di bidang pendidikan dengan tujuan pemerataan pendidikan di kabupaten pringsewu.

b. Sifat penelitian

Sedangkan dilihat dari sisi sifatnya, penelitian yang di lakukan pada dasarnya bersikap deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.¹⁴ Menurut sutrisno hadi penelitian yang bersifat deskriptif maksudnya adalah orang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan secara umum.¹⁵

Tujuan penelitian deskriptif merupakan gambaran dari sifat-sifat populasi pada daerah tertentu yang ada hubunngannya dengan masalah yang di hadapi setiap masyarakat tidak mampu di kabupaten pringsewu.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 1

¹⁴ Prastya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* (Jakarta, Setawan Pers, 1999), hal. 60

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta, Jilid 1 Fakultas Psikologi UGM 1986), hal. 3

2. Sumber data

a. Data primer

Abdurahmat fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁶ Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, di gunakan sebagai pokok yang di peroleh melalui interview dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil interview dan informan, informan dalam penelitian ini adalah staf dinas pendidikan kabupaten pringsewu, ketua komite.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut abdurahmat fathoni data yang sudah jadi, biasanya sudah tersusun dalam dokumen misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁷

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang di peroleh dari buku-buku literature dan informan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.

3. Metode pengumpulan data

Mendapatkan data-data sebagai alat analisis data, di perlukan metode pengumpulan data, adapun metode yang di gunakan adalah:

¹⁶ Abdurahmar Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), hal. 38

¹⁷ *Ibid.* hal. 40

a. Metode wawancara (interview)

Interview atau yang sering disebut juga wawancara atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.¹⁸

Daftar siswa siswi yang menerima kebijakan pendidikan gratis

	Nama	Jenjang pendidikan
1	Kiki nirmala	SMA
2	Iqbal maulana	SMA
3	Heri wibisono	SMA
4	Aji fitriansyah	SMA
5	Bayu indra lesmana	SMA
6	Susi rahmawati	SMA
7	Martin hermansyah	SMA
8	Ega wulandari	SMA
9	Intan puspa indri	SMA
10	Merry danovita	SMA
11	Nisaul munawaroh	SMA
12	Pratama adi prastyo	SMA
13	Rendi kuncoro	SMA
14	Aditya chandra mandala	SMA
15	Surti winarti	SMA
16	Kevin prasnanto	SMA
17	Widi astuti	SMA
18	Aldi ridho pradestiawan	SMA
19	Fandi kusuma wijaya	SMA
20	Panji agung perkasa	SMA

Jumlah laki-laki= 12

Jumlah perempuan= 8

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), hal. 145-146

b. Metode dokumentasi

Sebagai objek yang di perhatikan dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi, dan peraturan-peraturan.¹⁹

c. Metode analisa data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk di analisa. Data yang di peroleh di lapangan di analisa dengan menggunakan teknis analisis kualitatif. Teknis analisis kualitatif yaitu di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di pisah-pisahkan menurut kategori untuk di ambil suatu kesimpulan.²⁰

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikirinduktif. Berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

¹⁹ *Ibid.* hal. 149

²⁰ *Op cit*, hal. 3

H. Tinjauan pustaka

Penelitian dengan topik pendidikan gratis telah dilakukan oleh beberapa orang yang meneliti seperti:

1. Ilhami Dyah Puspitoningrum mahasiswi *Universitas Sebelas Maret Surakarta* tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Smp Negeri 1 Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009*, menyimpulkan bahwa adanya faktor bahwa masih banyak anak usia sekolah khususnya di kabupaten Sukoharjo terutama di kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah atau pun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan ekonomi.
2. Eka Febriana mahasiswi *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Bina Lingkungan Walikota Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung* yang menyimpulkan bahwa adanya anak yang tidak sekolah atau putus sekolah lantaran perekonomian dan besarnya biaya sekolah.
3. Sarid Armansyah mahasiswa *Universitas Negeri Makasar* tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul *Peningkatan Kualitas Siswa Sma Di Kota Maksar Dengan Pendidikan Gratis*, menyimpulkan bahwa wacana pendidikan gratis tidak berarti hanya bertujuan meningkatkan aksesibilitas pendidikan semata, melainkan perlu di tunjang perbaikan mutu yang terus menerus sehingga tercipta masyarakat indonesia yang cerdas ka kompetitif. Oleh karenanya kebijakan pendidikan juga perlu mengacu pada pendidikan terjangkau dan bermutu. Berpijak pada penemuan penelitian di atas, maka penelitian tentang

Model Resolusi Konflik Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pringsewu
(*Study desa bandung baru Di Kecamatan Adiluwih*) belum pernah di teliti
sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan tentang dampak atau akibat kebijakan
pemerintah tentang pemberlakuan pendidikan gratis di kabupaten Pringsewu.



BAB II

RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS

A. Pengertian konflik

Konflik berasal dari kata kerja *Latin configere* yang berarti saling memukul. Konflik, dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai percekocan, perselisihan, dan pertentangan.²¹ Defenisi konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda.

Secara umum konflik. dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Menurut Ralf Dahrendrof, dalam hubungan-hubungan kekuasaan beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak.²² Konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata sehingga bertambahnya kekuasaan pada suatu pihak akan dengan

²¹ Hamzah Ahmad, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya:Fajar Mulia,1996), hal.208

²² Ralf Dahrendrof, dalam Margaret M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jerman,Britania, 2000) hal 134

sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Dahrendorf berpendapat bahwa ada dua macam tataran konflik.

1. Konflik laten, yakni pertentangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terwujud dalam konflik terbuka.
2. Konflik manifest, jika konflik yang pertama tadi mewujudkan kedalam pertikaian terbuka.

Fungsi konflik menurut Dahrendorf adalah menciptakan perubahan dan perkembangan. Menurutnya, sekali kelompok-kelompok yang bertentangan muncul maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan di dalam struktur sosial, jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi secara tiba-tiba.

Dahrendorf juga menyatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan kekuasaan akan menghadapi dua kondisi, yakni konflik dan konsensus.²³ Di satu sisi akan menghadapi perbedaan, persaingan dan pertentangan pendapat, disisi lain juga memungkinkan terjadinya kekerasan atau konsensus. Oleh karena itulah konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat dan tidak akan dapat dilenyapkan melainkan diatur agar tidak mengakibatkan perpecahan.

²³ *ibid*, hal .130

Menurut Watkins, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling menghambat.²⁴ Fisher menyatakan konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan. Penyebab konflik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Ini akan diuraikan lebih lanjut:

1. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal ini sering menimbulkan konflik, karena masing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan.
2. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.

Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Namun jebakan kekuasaan menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya menjadi sumber kekerasan, baik atas nama keadilan maupun ketidakadilan. Konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya “perasaan” dirampas yang menimbulkan

²⁴ Robby I Chandra, *Konflik dlm kehidupan sehari-hari* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal.20

ketidak puasan.²⁵

Konflik juga dapat dikatakan sebagai pertentangan oleh karena terjadi perbedaan antara dua atau lebih baik individu maupun kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha menjadi dominan atas pihak lain. Ted Robert Gur dalam Maswadi Rauf menyebutkan ada empat prasyarat yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat dikatakan sedang mengalami konflik, ia mencirikan sebagai berikut:

1. *Ada dua pihak yang terlibat*, Pihak menang dan pihak yang kalah artinya pihak menang adalah pihak yang berhasil memenangkan pilkada dan meraih suara terbanyak serta diakui dan disahkan oleh undang-undang
2. *Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi.* Calon yang tidak berhasil memperoleh suara terbanyak adalah calon yang besar kemungkinannya membuat tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Tim sukses dari calon yang gagal biasanya membuat tindakan atau tidak merasa puas dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh calonnya..
3. *Mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai, menghalang-halangi lawannya.* Pendukung calon yang gagal biasanya membuat tindakan kekerasan baik di Kantor KPU maupun di lokasi-lokasi lainnya. Sedangkan calon yang menang

²⁵ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), hal 208.

tindak memberikan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

4. *Interaksi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa dengan mudah dideteksi oleh pengamat independen.*

Konflik merupakan gejala sosial yang seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk konflik yang diilhami dari pandangan para ahli sosiologi.²⁶

Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.

1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpolisi politik karena perbedaan ideologi,

²⁶ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penajagan Politik* (Jakarta: Direktorat enderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hal. 7

asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antarpolisi politik pada saat kampanye.

3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
4. Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut.²⁷

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antarpolisi politik, antarnegara, atau organisasi internasional.

²⁷ Ralf Dahrendorf, *Op Cit* hal, 133

B. Resolusi Konflik

Resolusi atau penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace building*. Rekonsiliasi memiliki pengertian perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan.²⁸

Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Pengelolaan konflik berarti mengusahakan agar konflik berada pada level yang optimal. Jika konflik menjadi terlalu besar dan mengarah pada akibat yang buruk, maka konflik harus diselesaikan.

Menurut Ralf Dahrendorf penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. *Kedua*, kepentingan yang

²⁸ <http://www.artikata.com/arti-347394-rekonsiliasi.html> diakses 28/04/2018 jam 11.15

diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi diantara mereka.²⁹

Prof. Nasikun mengidentifikasikan melalui tiga cara mengenai pengendalian konflik, yaitu dengan rekonsiliasi (*reconciliation*) usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih, mediasi (*mediation*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah/penasehat, dan perwasitan (*arbitration*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih bersama dan punya kedudukan lebih tinggi. Strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi:³⁰

1. Koesistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen.
2. Mediasi (perantaraan), Jika penyelesaian konflik menemui jalan buntu, masing-masing pihak bisa menunjuk pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Dalam pemecahan konflik dan menciptakan rekonsiliasi maka dibutuhkan

²⁹ Ralf Dahrendrof, *Op Cit* hal.150

³⁰ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 21.

pertemuan tatap muka dari pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka. Syarat terpenting untuk mencapai rekonsiliasi menurut Robert F. Bandle, adalah kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan devaluasi, baik dalam nilai ideologis maupun nilai power. Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:³¹

1. *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
2. *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.
3. *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (atau the absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana

³¹ Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, (Yogyakarta :Graha Ilmu ,2007) hal 93.

masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Resolusi konflik pada umumnya dipahami sebagai suatu kerangka teoritik dan praktik yang bertugas tidak saja untuk mengurangi dampak kerusakan yang terjadi akibat konflik, tetapi juga menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Jadi resolusi konflik suatu teori yang memberikan penekanan penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik dan kebutuhan melihat perdamaian dalam jangka panjang.

Secara konsepsional jika terjadi konflik dan aksi-aksi kekerasan yang massif maka resolusi konflik dapat dilakukan dengan empat tahap. *Tahap pertama* masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya mengendalikan kekerasan bersenjata antara kelompok yang bertikai. *Kedua*, memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok yang bertikai. Tahapan ini biasanya dicirikan dengan dialog dan perundingan antar pihak-pihak yang bertikai. *Ketiga*, bernuansa sosial dan berupaya menerapkan problem solving approach. *Terakhir*, bernuansa cultural kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial budaya yang dapat mengarah pada komunitas perdamaian yang langgeng.

Andi Wijayanto menjabarkan resolusi konflik menjadi empat alasan.

Pertama, konflik tidak boleh saja dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer namun harus juga dilihat sebagai suatu fenomena sosial.

Kedua, konflik memiliki suatu siklus yang tidak berjalan linear. Siklus

hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik. *Ketiga*, sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variable tunggal. Suatu konflik sosial apalagi yang didasari motif-motif politik harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. *Keempat*, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

C. Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa apabila para pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya. Baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pada pihak lain.³² Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak terselesaikan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses *Ajudikasi* ataupun *Alternative Disputes Resolution* (ADR). *Ajudikasi* merupakan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan *Alternative Disputes Resolution* (ADR) adalah

³² Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. *Sengketa dan Penyelesaiannya*. (Jakarta, Indonesian Center For Enviromental Law, 1977). Hal. 24.

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan engan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

1. Arbitrase

Kata Arbitrase berasal dari *Arbitrase* (Latin), *Arbitrage* (Belanda), *Arbitration* (Inggris), *Schiedspruch* (Jerman) dan *Arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit³³. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa, atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka.³⁴ Pemilihan arbiter biasanya di dasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam bidang tertentu dan bertindak secara netral. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase dalam perkembangan akhir-akhir ini sudah banyak dilakukan oleh oara pihak yang bersengketa. Selain karena prosesnya cepat, kalangan *professional* memilihnya karena bersifat sangat dijaga. Putusannya, yang *final and binding*.

³³Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Peradilan*.(Jakarta, Transmedia Pustaka,2003), hal. 99.

³⁴ *Ibid.*, hal. 110.

H. Priyatna Abdurrasyid mengatakan arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Butir 1 menyebutkan bahwa definisi arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa faktor penting dari arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak untuk:

1. Menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga (di luar pengadilan umum,
2. Menugaskan pihak ketiga tersebut untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan,
3. Menerima putusan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

2. Adjudikasi

Adjudication merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang baru berkembang di beberapa negara. Sistem ini sudah mulai populer di Amerika dan Hongkong.

Secara harafiah, pengertian “ajuddication” adalah putusan. Dan memang demikian halnya. Para pihak yang bersengketa sepakat meminta kepada

seseorang untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantaramereka:

1. Orang yang diminta bertindak dalam adjudication disebut adjudicator
2. Dan dia berperan dan berfungsi seolah-olah sebagai HAIM (act as judge),
3. Oleh karena itu, dia diberi hak mengambil putusan (give decision).

Pada prinsipnya, sengketa yang diselesaikan melalui sistem adjudication adalah sengketa yang sangat khusus dan kompleks (complicated). Tidak sembarangan orang dapat menyelesaikan, karena untuk itu diperlukan keahlian yang khusus oleh seorang spesialis profesional. Sengketa konstruksi misalnya. Tidak semua orang dapat menyelesaikan. Diperlukan seorang insinyur profesional. Di Hongkong misalnya. Sengketa mengenai pembangunan lapangan terbang ditempuh melalui lembaga adjudication oleh seorang adjudicator yang benar-benar ahli mengenai konstruksi lapangan terbang.

Proses penyelesaian sengketa dalam sistem ini, sangat sederhana. Apabila timbul sengketa :

1. Para pihak membuat kesepakatan penyelesaian melalui adjudication,
2. Berdasar persetujuan ini, mereka menunjuk seorang adjudicator yang benar-benar profesional,
3. Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak diberi kewenangan

(authority) kepada adjudicator untuk mengambil keputusan

(decision) yang mengikat kepada kedua belah pihak

(binding to each party)

4. Sebelum mengambil keputusan, adjudicator dapat meminta informasi dari kedua belah pihak baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

D. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan ekonomi Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.³⁵ Irfan Islamy, kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan

³⁵ Budi Winarno, *kebijakan publik teori dan proses*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2007) hal. 15

memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

E. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan gubernur, dll. Secara terminologi pengertian kebijakan publik sangat banyak, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.³⁶ Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

³⁶ J.L. Pressman and Wilddavsky, *implementation*, (Barkley And Los Angeles, University Of California Pres, 1973), hal. 17

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

1. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. William N. Dunn membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:³⁷

a. Masalah Kebijakan

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum pernah terpuaskan. Tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan

³⁷ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Gadjahmada University press, 2000), hal. 21

membutuhkan informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Alternatif Kebijakan

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Tindakan Kebijakan

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d. Hasil kebijakan

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e. Hasil-guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan- kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

F. Pengertian pendidikan

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata Pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.³⁸

Istilah pendidikan jika dilihat dalam bahasa Inggris adalah *education*, berasal dari bahasa latin *educare*, dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan (*to lead forth*). Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli berpendapat *pertama*; bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat *kedua*; bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih didalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman.³⁹

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta *kamus besar bahasa indonesia*, (Balai Pustaka, University Of California 2007), hal. 232

³⁹ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 77.

Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang umat manusia. John dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat di pahami sebagai upaya konservatif dan progresuf dalam bentuk pendidikan sebagai pendidikan formasi, rekapitulai dan retrospeksi dan sebagai rekontruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan salah satu agenda pemerintah yang patut di aktualisasikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu amanat dalam pembukaan uud 1945 alenia ke 4 di katakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

1. Manajemen pendidikan

Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat-alat yang di perlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan. Majemen pendidikan merupakan rangkaian proses

⁴⁰ Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 56

yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang di kaitkan dengan bidang pendidikan.⁴¹

Manajemen pendidikan juga dapat di maknai semua kegiatan yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan policy pengarahannya, kordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti penjaga sekolah dan sebagainya.⁴²

Subtansi yang menjadi garapan pendidikan sebagai proses atau di sebut dengan fungsi menejemen pendidikan adalah perencanaan perencanaan dan pengendalian. Garapan manajemen pendidikan dalam sebuah sistem manajemen terkait dengan bidang apa saja yang di kelola untuk menghasilkan sesuatu yang di inginkan termasuk mengelola sumber daya yang di miliki oleh organisasi. Sumber daya tersebut adalah manusia, uang, material, tehnik/cara, mesin, pasar, dan waktu.⁴³

Dengan demikian, maka menejemen pendidikan adalah serangkaian usaha pengelola sumber daya dengan acara perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan evaluasi yang di maksud untuk kebutuhan pendidikan.

G. Kebijakan Pendidikan Gratis

Kebijakan tentang pendidikan merupakan kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik ini yaitu kebijakan pendidikan gratis secara

⁴¹ Ara Hidayat, Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta, Kaukaba, 2013), hal. 5

⁴² *Ibid*, hal. 7

⁴³ *Ibid*, hal. 8

nasional sudah di luncurkan sejak terbitnya peraturan pemerintah indonesia no. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Adanya program wajib belajar ini menjamin masyarakat indonesia untuk dapat mengakses pendidikan dasar, sebagaimana di sebutkan pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Program ini berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara indonesia. Pendidikan gratis bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.⁴⁴

Gratis menurut poerwadarminta secara harfiah adalah cuma-Cuma (tidak dipungut biaya). Jika gratis di frasekan dengan kata pendidikan maka dapat diartikan bahwa pendidikan gratis adalah pelayanan yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengasuh pesantren, guru dan pegawai sekolah/pesantren untuk menyiapkan kebutuhan dan melayani segala keperluan siswa tanpa memungut biaya dari orang tua/wali dan siswa.⁴⁵

⁴⁴ PP No 47 tahun 2008 pasal 9 ayat 1

⁴⁵ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) hal 50

Pendidikan gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.⁴⁶

1. Dana Pendidikan

Pendidikan tidak terlepas dari dana, meskipun pendidikan itu gratis.

Istilah gratis hanyalah istilah yang bersumber dari konsumen pendidikan, karena dengan gratis itu konsumen pendidikan tidak mengeluarkan dana. akan tetapi, pengelola pendidikan tentunya mengeluarkan dana paling tidak untuk operasionalnya. Pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien inilah yang dapat menutupi dana pendidikan yang menjadi beban konsumen.

Dana pendidikan merupakan hal yang urgen dan penting. Adanya dana pendidikan menjadi faktor penting untuk peningkatan mutu pendidikan. Cohn mengatakan, biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Senada dengan Edgar bahwa biaya adalah salah satu di

⁴⁶ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008) hal 84

antara sekian banyak faktor penentu yang berfungsi dalam penyeleenggaraan proses belajar mengajar.⁴⁷

Asumsi-asumsi di atas menunjukkan bahwa dana pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan. Dana pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dana pendidikan pun berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Manajemen dan dana pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Dana pendidikan memerlukan pengelolaan yang baik agar dana pendidikan menjadi efisien

Manajemen pengelolaan pembiayaan yang tepat adalah dengan memperhatikan skala prioritas, mengutamakan kebutuhan urgen serta memperhatikan kondisi keuangan yang dimiliki, hal itu akan menyelamatkan ekonomi institusi sekolah dan terhindar dari penggunaan pembiayaan yang tidak efektif. Menurut Nur Kholis, bagian dari tanggungjawab pemimpin terhadap keuangan adalah memberi perhatian lebih besar pada program-program kelembagaan yang di prioritaskan atau yang di anggep paling penting untuk sementara waktu.⁴⁸ Dengan demikian, manajemen keuangan dan pemniayaan pendidikan ada hubungannya dengan kepemimpinan, khususnya kepala sekolah yang bertanggungjawab akan hal ini.

2. Mutu pendidikan

⁴⁷ Edgar C. Morphet, *The Economics And Financing Of Education* (New Jersey:Prenticce Hall Inc.,Engelwood Cliff, 1983), hal 83

⁴⁸ Nur Kholis, *Kiat Sukses Jadi Praktisi Pendidikan* (Yogyakarta: PALEM, 2004), hal 65

Definisi tentang pendidikan telah di kemukakan oleh banyak ahli yang di rangkum dalam kartini kartono adalah sebagai berikut:

a. MJ Langeveld

- Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum kepada kedewasaan.
- Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia dapat mandiri, akil balik dan bertanggungjawab secara susila.
- Pendidikan adalah usaha mencapai penentu diri susila dan bertanggungjawab.

b. Encyclopedia americana

- Pendidikan merupakan suatu proses yang di pakai individu untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan, atau mengembangkan sikap-sikap atau keterampilan-keterampilan.
- Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis dan intensional, di bantu oleh metode dan teknik ilmiah, diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu.⁴⁹

Sedangkan pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.

Pendidikan yang bermutu bukan suatu yang terjadi dengan sendirinya,

⁴⁹ Kartini, Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik Dan Sugesti* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2004) hal 11-12

dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan, jika suatu proses pendidikan berjalan baik, efektif, dan efisien, maka terbuka peluang yang sangat besar memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas. Pengertian mutu atau kualitas merupakan suatu konseptual yang relatif. Menurut Edward Sallis mutu di definisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan/pengguna. Namun pengertian mutu ini masih terdapat kelemahan yaitu pelanggan/pengguna yang mempunyai pengetahuan dan wawasan tersebut, maka pendapat tersebut tidak dapat dijadikan standar. Untuk itu terdapat penambahan penjelasan yaitu berdaya guna dan pemenuhan atau melebihi standar.⁵⁰

Pengertian lebih filosofis kearah mutu pendidikan di sampaikan oleh Suryobroto sebagai berikut: "Proses pembelajaran yang diikuti terjadinya proses sosialisasi dan perbudayaan serta pengembangan kemampuan yang memungkinkan dapat hidup dalam masyarakat dan mampu memperbaiki kehidupannya". Pengertian ini dapat dijabarkan bahwa mutu pendidikan merupakan pembelajaran dengan menghasilkan siswa yang mempunyai kemampuan menghadapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini lingkungan pendidikan, masyarakat, teknologi, dan tuntutan pengetahuan dan wawasan.⁵¹

⁵⁰ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education* (London: Kogan Page Limited, 2002), hal 56

⁵¹ Suryobroto, B, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 92

Edward sallis menyatakan bahwa banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialis atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajaran anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Pertanyaan di atas menunjukkan bahwa terdapat banyaknya sumber mutu dalam bidang pendidikan, sumber ini dapat di pandang sebagai faktor pembentuk dari suatu kualitas pendidikan, atau faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.⁵²

3. Pemerataan pendidikan

Pendidikan merupakan hak bagi segenap warga. Sudah tidak asing lagi perkataan *education for all*. Pendidikan merupakan pendidikan sosial yang oleh negara harus difasilitasi. Pendidikan sudah masuk ranah kebijakan publik dan sosial. Oleh karena itu, negara harus dapat mewujudkannya. Secara tegas, pancasila sebagai landasan negara indonesia di sebutkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, tidak terkecuali perihal peendidikan. Pendidikan merupakan hak segenap warga negara indonesia.

⁵² Edward Sallis *Op Cit*, hal 30-31

Dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Pemerataan pendidikan merupakan problem yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tidak semua pendidikan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia.

Pemerataan pendidikan merupakan sebuah konsep turunan dari pendidikan untuk semua yang dijamin oleh undang-undang dan kebijakan yang telah ada. Dengan adanya pemerataan, pendidikan diharapkan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, kebutuhan pendidikan tersebut dapat dipenuhi pada pendidikan tingkat dasar sesuai dengan kebijakan PP Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.⁵³

⁵³ PP No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, (Jakarta, Visimedia), hal. 19

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU

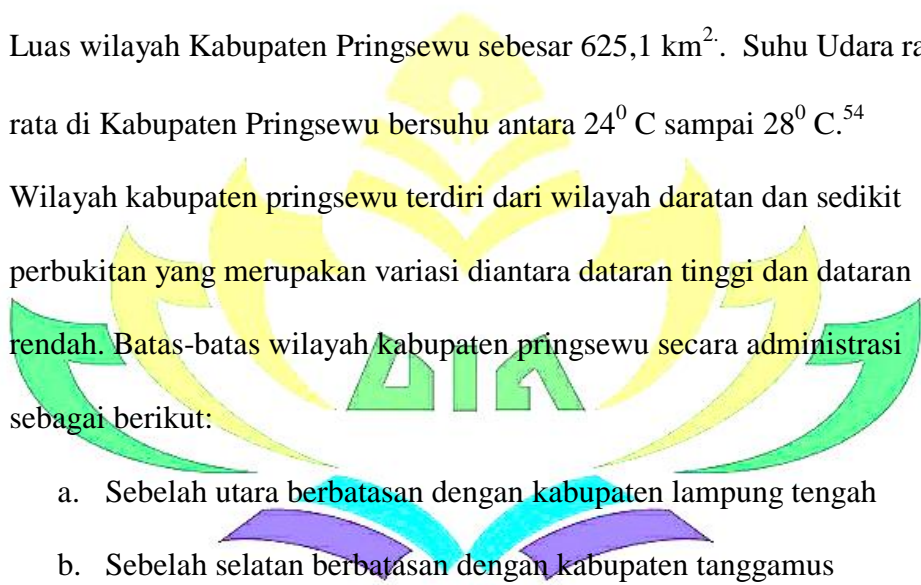
A. Keadaan umum kabupaten pringsewu

1. Keadaan geografis

Secara geografis wilayah kabupaten Pringsewu terletak di antara $104^{\circ}45'25''$ – $105^{\circ}8'42''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'10''$ – $5^{\circ}34'27''$ Lintang Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Pringsewu sebesar $625,1 \text{ km}^2$. Suhu Udara rata-rata di Kabupaten Pringsewu bersuhu antara 24° C sampai 28° C .⁵⁴

Wilayah kabupaten pringsewu terdiri dari wilayah daratan dan sedikit perbukitan yang merupakan variasi diantara dataran tinggi dan dataran rendah. Batas-batas wilayah kabupaten pringsewu secara administrasi sebagai berikut:

- 
- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten lampung tengah
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten tanggamus
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tanggamus
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pesawaran.

Wilayah kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten tanggamus dan dibentuk berdasarkan undang-undang no. 48 tahun 2008 tanggal 26 november 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 april 2009. Potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

⁵⁴ BPS Pringsewu, *Arsip Dokumen* Kabupaten Pringsewu, hal.11

Sesuai perda kabupaten pringsewu no. 12 tahun 2012 tercatat sembilan kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, dan Kecamatan Pagelaran Utara. Berdasarkan dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsweu terdapat 5 kelurahan dan 126 Desa/Pekon.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu mencapai 409.369 jiwa. Lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Jumlah penduduk pada kabupaten Pringsewu

	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kartu Keluarga	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Sukoharjo	73	51.519	13.053	142
2	Ambarawa	31	35.795	9.160	87
3	Pagelaran	95	52.706	13.488	180
4	Adiluwih	75	33.731	8.801	222
5	Pringsewu	53	82.677	21.357	64
6	Banyumas	40	22.195	5.758	180
7	Pardasuka	95	39.426	9.510	241
8	Gadingrejo	86	73.838	18.721	116
9	Pagelaran	78	17.482	4.04	466

	utara			6	
Jumlah	626	409.369	103.885	1698	

2. Topografi dan iklim

Menurut Pringsewu dalam angka (2013), kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625.1 km² atau 62.510 ha. Secara topografi kabupaten pringsewu merupakan kabupaten yang sebagian besar berupa wilayah daratan. Wilayah Pringsewu bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi yang sebagian besar merupakan bentangan dataran yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah. Ketinggian dari permukaan laut antara 800 meter sampai dengan 1.115 meter dari permukaan laut. Kabupaten pringsewu merupakan daerah tropis dengan rata-rata curah hujan yaitu 161,8 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 13,1 hari/bulan.⁵⁵

B. Keadaan umum kecamatan adiluwih

Berdasarkan Adiluwih dalam angka (2015) kecamatan Adiluwih memiliki luas wilayah 74,82 km² atau 7428 ha. Kecamatan Adiluwih merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pringsewu. Penduduk yang berada di Kecamatan Adiluwih berjumlah 34.081 jiwa yang terdiri dari laki-laki 17.456 jiwa dan perempuan 17.434 jiwa dengan sex ratio 100,13, yang artinya setiap 100 perempuan terdapat laki-laki sebesar 100,13. Kecamatan Adiluwih memiliki 13 pekon atau desa dengan data administratif sebagai berikut :

⁵⁵ BPS Pringsewu, *Arsip Dokumen Kabupaten Pringsewu*, hal. 15

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kalirejo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sukoharjo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Banyumas
- d. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Negri Katon.

1. Sejarah desa Bandung Baru

Asal mula pemberian nama desa Bandung Baru ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat yang berasal dari Jawa Barat. Musyawarah para tokoh tersebut disepakati nama bandung baru sebagai nama pekon. Pekon Bandung Baru terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, sayur-sayuran dan palawija. Pada mulanya pekon ini menjadi 16 dusun, yaitu dusun Bandung Baru, dusun Srimukti, dusun Bandung Barat, dusun Totokarto, dusun Sukamanah, dusun Kutawaringun, dusun Empang Sari, dan dusun Adinunggal. Kemudian pada tahun 2012 pekon Bandung Baru dimekarkan menjadi 4 pekon yaitu pekon Bandung Baru, pekon Bandung Barat, pekon Totokarto, dan pekon Kutawaringin.⁵⁶

Penelitian ini dilakukan di desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu. Desa Bandung Baru memiliki luas daerah 596.600 ha dengan lahan produktif 380,6 ha yang meliputi pemukiman, sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah tadah hujan, perkebunan, tegalan, pasar, jalan dan lain-lain. Jumlah penduduk pada

⁵⁶ Pemerintah pekon sekretariat, *Monografi Desa Bandung Baru*, hal. 5

desa Bandug Baru yaitu 6752 jiwa. Jarak desa Bandung Baru dengan ibukota kecamatan adalah 8 km, sesangkan dengan ibukota kabupaten Pringsewu adalah 14 km. Secara administratif letak desa Bandung Baru sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Sinarwaya dan Balerejo kecamatan Kalirejo.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Totokarto kecamatan Adiluwih.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Waringin Sari Barat kecamatan Sukoharjo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Bandung Barat kecamatan Adiluwih.⁵⁷

Sebagian besar penggunaan lahan di desa Bandung Baru digunakan untuk pemukiman penduduk yaitu sebesar 216.006 ha, sedangkan penggunaan lahan untuk perkebunan sebesar 115.885 ha. Penggunaan lahan di desa Bandung Baru dapat di lihat pada tabel 2

Tabel 2. Penggunaan lahan di desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih

no	Tata guna tanah	Luas (ha)	(%)
1	Pemukiman	216.006	36,04
2	Sawah irigasi teknis	-	-
3	Sawah irigasi tengah teknis	108.297	18,07
4	Sawah tadah hujan	67.927	11,33
5	Perkebunan	115.855	19,33
6	Tegalan	90.570	15,11
7	Pasar	1	0,01
8	Pemakaman	3,5	0,01

⁵⁷ Pemerintah pekon sekretariat, *Monografi Desa Bandung Baru*, hal 8

9	Jalan, sungai dll	590	0,10
Jumlah		599.249,5	100,00

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar di desa bandung baru digunakan untuk pemukiman warga, pemukiman dengan luas sebesar 216.006 ha artinya dapat menunjukkan jumlah masyarakat yang menetap di desa Bandung Baru dengan jumlah yang besar.

C. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang mutlak bagi warga negara Indonesia. Pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah generasi tak terkecuali di desa Bandung Baru. Dimana desa bandung baru sebagai salah satu desa yang memiliki kemajemukan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik strata sosio-kultur, politik, ekonomi, juga kondisi geografis dan topografi alamnya.

Perbedaan yang dimiliki masyarakat itu di suatu pihak menjadi kebanggaan, tetapi di lain pihak menjadi penghambat dalam menjalankan roda pendidikan, khususnya pembangunan di dunia pendidikan. Pendidikan yang ada di Desa Bandung Baru belum merata. Karena di desa tersebut masih dalam keadaan ekonomi bawah, sehingga dalam pendidikan masih belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan .

Berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di suatu daerah desa Bandung Baru masih sering muncul. Masih kurangnya sarana dan prasarana.

Permasalahan lainnya adalah angka putus sekolah juga masih relatif tinggi. Serta pola pembelajaran anak yang masih konvensional, sebab kondisi masyarakat yang memang perekonomiannya masih dalam taraf menengah kebawah.

Kondisi tersebut menjadi kondisi yang lumrah di daerah desa Bandung Baru tapi di satu sisi menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa Bandung Baru. Tak banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-anak di daerah desa Bandung Baru, namun, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Bandung Baru membuat masalah ini menjadi perhatian khusus.

Semua kondisi dan masalah yang ada di daerah terpencil menjadi masalah bersama yang menggugah rasa nasionalisme kita untuk mengatasinya. Dalam perspektif ini rasa nasionalisme yang kita bangun terbentuk melalui kesadaran universal dari seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberi prioritas bagi kebijakan pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di desa Bandung Baru.

Kita tidak lagi memikul senjata untuk menentang segala bentuk kolonialisme dari luar tetapi kita membangun semangat nasionalisme

untuk merasakan dan mengambil sikap kongkret dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak yang ada di desa Bandung Baru,

Kebijakan pendidikan sekolah gratis memang sudah ada dari pihak pemerintah yaitu dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun, hal ini tidak

Lah sesuai dengan yang sebagaimana mestinya sehingga masyarakat Bandung Baru banyak yang merasa berat dalam membayar pendidikan.

Maka dengan itu aparat pemerintah desa Bandung Baru membuat kebijakan untuk anak-anak yang kurang mampu dan putus sekolah serta anak yang berprestasi.

Penduduk desa Bandung Baru jika ditinjau dari pendidikan formal memiliki pendidikan yang beragam yaitu sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi. Secara rinci jumlah penduduk desa Bandung Baru berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah penduduk desa Bandung Baru berdasrakan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikam	Penduduk	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	86	1,53
2	Tamat SD	771	13,80
3	Tamat SMP	2.441	43,66
4	Tamat SMA	1.751	31,32
5	Tamatan akademik D1-D3	136	2,43
6	Tamatan S1	156	2,80
7	Tamatan S2	4	0,07
8	Putus sekolah	245	4,39

Jumlah	5.590	100%
--------	-------	------

Tabel 3 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Bandung Baru beragam. Mayoritas penduduk di desa Bandung Baru berpendidikan SMP yaitu sebanyak 2.441 jiwa (43,66%), terdapat pula pendidikan sarjana yaitu sebanyak 160 jiwa (2,87%). Hal ini menggambarkan penduduk desa Bandung Baru memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Mayoritas penduduk desa ini sudah melakukan wajib belajar 9 tahun, artinya pendidikan yang di dapatkan sudah termasuk baik.

D. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Penduduk desa Bandung Baru dalam memenuhi kebutuhan pokoknya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, namun yang paling dominan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, secara rinci jumlah penduduk desa Bandung Baru berdasarkan mata pencaharian dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah penduduk desa Bandung Baru berdasarkan mata pencaharian

NO	Jenis mata pencaharian	Jiwa	Persentase (%)
1	PNS	77	1,14
2	TNI dan polri	1	0,01
3	Pensiun	44	0,65
4	Petani	2.532	37,50
5	Buruh tani	2.076	30,75
6	Buruh bangunan	177	2,62
7	Pedagang	267	3,96
8	Sopir	28	0,41
9	Tukang ojek	5	0,07
10	Pengurus rumah tangga	965	14,30
11	Belum bekerja	455	6,74
12	Tidak bekerja	120	1,78
13	Lain-lain	5	0,07

Jumlah	6.752	100
--------	-------	-----

Tabel 4 menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk di desa Bandung

Baru bermata pencaharian sebagai buruh tani sebesar 2.076 jiwa (30,75%), petani sebesar 2.532 jiwa (37,50%). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan untuk membantu penduduk memenuhi kebutuhan hidup mereka. sebagian kecil penduduk lain bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, buruh bangunan, pedagang, sopir, tukang ojek, dan pensiunan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup.

E. Keadaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berlangsung. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan hal utama untuk terselenggaranya suatu proses acara. Keadaan sarana dan prasarana desa Bandung Baru sudah cukup baik terlihat dari tersedianya beberapa jenis sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan masyarakat.

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di pekon Bandung Baru meliputi sarana perdagangan dan kesehatan, sarana perdagangan di pekon Bandung Baru berupa pasar yang berada di dusun Bandung Baru, dan pada bidang kesehatan pekon Bandung Baru terdapat puskesmas pembantu (PUSTU) yang berada di dusun Bandung Baru. Terdapat pula fasilitas MCK umum yang berada di pasar dengan kondisi yang baik.

Sarana dan prasarana di desa Bandung Baru cukup lengkap. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya sarana dan prasarana yanag ada di desa tersebut seperti tempat peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kegiatan perekonomian.



BAB IV

ANALISIS MODEL RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI DESA BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU

1. Cara memenuhi kuota pendidikan gratis didesa Bandung Baru

Kuota untuk bantuan pendidikan gratis di desa Bandung Baru tidak dibatasi.

Seluruh siswa yang kurang mampu dan berprestasi memiliki potensi besar untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada di desa dan diluar desa. Meski demikian, kepala desa bandung baru bapak Hadi Sutrisno menyatakan bahwa kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu program yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat di desa bandung baru, supaya menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama, untuk memenuhi kuota dalam kebijakan ini yang jelas harus penduduk dari desa bandung baru, adapun syarat-syaratnya salah satunya ialah kartu keluarga. Sebab, ada petugas nya sendiri yang akan menyeleksi anak tersebut dengan sangat detail. Salah satunya dengan melakukan survei ke rumah-rumah. Kroscek itu dilakukan setelah anak tersebut diterima di disekolah yang sudah anak itu terima.⁵⁸

Dengan tidak ada ketentuan batasan kuota, kebijakan pendidikan gratis itu justru bisa menerima semakin banyak anak didik baru. Beberapa kriteria harus terpenuhi. Selain ekonomi yang kurang mampu, aparat desa bandung baru akan memperhatikan prestasi, rapor, akreditasi sekolah (prestasi sekolah).

Pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat desa bandung baru untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga negara

⁵⁸ Hadi Sutrisno kepala pekon Bandung Baru, Wawancara Pribadi, 23 Mei 2018

sebagaimana amanat UUD 1945. Sebagaimana disampaikan kepala sekolah SD Negeri 1 Adiluwih bahwa, “Pendidikan gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah itu diaplikasikan dalam program BOS. Secara umum, program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu”. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik. Melalui kebijakan ini bisa dilihat sejauh mana pemerintah melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, hanya memberitakan ribuan lulusan SD tidak mendapat kursi di SMP Negeri tidak cukup. Kebijakan tersebut sangat sempurna, tetapi ketika berada di lapangan pasti akan mengalami penyesuaian situasi dan kondisi sekolah.

Penyesuaian RAPBS setelah turunnya kebijakan sekolah gratis, sekolah mengadakan koordinasi dengan pengurus sekolah, komite sekolah dan yayasan (untuk swasta). Ini menunjukkan bahwa sekolah telah memberi peluang kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam mensukseskan pendidikan. Karena dengan bergabungnya komite sekolah maka sekolah akan lebih banyak mendapatkan saran dan evaluasi.

Untuk perkembangan sekolah dalam hal pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas. Peningkatan pemerataan pendidikan, dengan adanya dan BOS berdampak sangat bagus, Karena dengan adanya BOS masyarakat menjadi termotivasi untuk meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya, karena asumsi mereka pendidikan sudah mulai murah. Program

pemerintah untuk mengurangi kebodohan telah tercapai dengan banyaknya siswa yang mau meneruskan, sampai-sampai pada sekolah negeri melebihi kuota.

Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa/peserta didik, tetapi masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya Program kebijakan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Desa Bandung Baru.

Program pendidikan gratis dari desa Bandung Baru adalah Program desa yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Melalui Program kebijakan pendidikan gratis dari pemerintah desa Bandung Baru ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program ini juga mendukung komitmen

pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Besarnya anggaran untuk beasiswa miskin diberbagai jenjang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Salah satu warga yang anaknya mendapatkan bantuan pendidikan dari Desa adalah bapak Solihin, dan dia mengungkapkan “dengan adanya program pendidikan gratis dari kebijakan pemerintahan Desa Bandung Baru ini sangat membantu saya, sehingga anak saya dapat melanjutkan sekolah lagi, semoga program ini terus berlanjut menolong keluarga-keluarga yang tidak mampu”.

Program pendidikan gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Bandung Baru merupakan program yang sangat luar biasa untuk mendobrak pendidikan anak-anak yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan yang seharusnya. Dengan program ini pendidikan

akan menjadi lebih bermutu dan jika daerah-daerah lain dapat mengeluarkan kebijakan yang seperti ini maka pendidikan yang ada di negara Indonesia ini akan menjadi negara yang terus berkembang dalam dunia pendidikan.

Walaupun pemerintah mengeluarkan bantuan BOS ini pada kenyataannya masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga masih saja anak-anak yang putus sekolah. Namun dengan adanya bantuan dari pemerintah yaitu dana BOS, maka pendidikan yang ada akan semakin bermutu dan permasalahan-permasalahan akan teratasi dengan diimbangi program kebijakan pendidikan gratis yang ada di Desa Bandung Baru.

a. Penerima pendidikan gratis dari desa Bandung Baru

Penerima dana pendidikan gratis yang dikelola oleh pemerintah desa Bandung Baru dan adalah siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bandung Baru

Penerima Program kebijakan ini yang dikelola oleh aparat desa adalah siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta di desa Bandung Baru yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dihitung berdasarkan proporsi populasi murid di masing-masing dusun.

Siswa miskin adalah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

Kriteria penerima program pendidikan gratis untuk Madrasah adalah sebagai berikut:

- Orangtua siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
- Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin
- Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya
- Siswa yatim, piatu atau yatim piatu
- Siswa yang berasal dari panti asuhan
- Siswa berasal dari korban musibah dari Rumah Tangga Sangat



Miskin

Dana bantuan pendidikan gratis dapat dimanfaatkan untuk:

- Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas)
- Biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah
- Uang saku siswa untuk sekolah.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada

dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.⁵⁹

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.⁶⁰

⁵⁹ Peraturan Mendiknas No. 69 Tahun 2009

⁶⁰ Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 45

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions/FAQ*) terkait dengan BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih
- Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
- Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh

provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program.⁶¹

B. Model resolusi konflik kebijakan pendidikan gratis di desa Bandung Baru

Dengan kondisi masyarakat Desa Bandung Baru, tidak sedikit anak-anak putus sekolah dan ada juga yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya untuk sekolah, meskipun program dari pemerintah untuk sekolah Gratis, namun itu pun masih menjadi momok untuk masyarakat karena masih banyak pemungutan biaya yang dianggap itu memberatkan masyarakat.

Menurut kepala desa Bandung Baru bapak Hadi sutrisno
“Fenomena pendidikan gratis dalam implementasinya masih terjadi di berbagai Kabupaten, jenis masalah dalam pendidikan gratis masih berwarna-warni, sebagaimana kondisi yang ada di desa Bandung Baru. Dengan adanya pendidikan gratis yang di salurkan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun fenomena didalam pelaksanaannya masih terus terjadi. Apakah karena konsep pendidikan yang merupakan sinerjitas dari konsep pusat yang tidak searah sehingga fenomena ini masih menjalar atau konsep kabupaten yang tidak mampu

melakukan sebuah perencanaan kebijakan. Masalah tersebut dapat dilihat pada beberapa kondisi anak didik”. ⁶²

Sentuhan pendidikan gratis di Pringsewu khususnya di desa Bandung Baru terlihat masih terfokus pada siswa yang ada di sekolah, padahal pemerataan pendidikan dinilai sudah diimplementasikan seiring dengan penerapan pendidikan gratis 2008. Landasan lahirnya konsep pendidikan gratis disebabkan karena tingginya angka putus sekolah yang disebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam konteks pembiayaan. Namun pada realitasnya, substansi dari pelaksanaan belum menyentuh pada wilayah anak-anak yang putus sekolah. Disini terlihat bahwa kebijakan pendidikan dan konsep pemerataan terlihat masih simpang siur dan ambiguitas, antara perencanaan dengan tujuan yang akan dicapai.

Pendidikan gratis di Pringsewu masih dinilai kurang maksimal, pasalnya program pendidikan gratis tersebut belum menyentuh anak putus sekolah. Sentuhan program tersebut hanya sebatas pada anak yang kurang mampu.

Ketidakmampuan pemerintah melihat kenyataan di lapangan dalam pengambilan kebijakan dapat dilihat dari hasil rilis LSM, tentang tingkat persentasi anak yang putus sekolah di Pringsewu dan khususnya di desa Bandung Baru selama pendidikan gratis diimplementasikan, masih ribuan

⁶² Hadi Sutrisno kepala pekon Bandung Baru. Wawancara Pribadi, 23 Mei 2018

orang yang tidak terakomodir, berarti profesionalisme perencanaan belum baik.

Tingginya anak putus sekolah di desa Bandung Baru merupakan hal fenomenal terhadap kebijakan pendidikan. selain dari itu, sorotan juga muncul dari beberapa kebijakan yang dianggap kurang realistis dalam implementasi pendidikan gratis, Hasil survei menunjukkan ketimpangan sinerjitas penganggaran pendidikan gratis antara kabupaten dan provinsi masih terjadi. Senada dengan itu, budaya transparansi dan pengawasan di tubuh pemerintahan masih rendah dan lemah. Sehingga solusi dari ketimpangan pengimplementasian pendidikan mengalami jalan buntu. Perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tidak sistematis serta tidak didorong dengan political will, sehingga menjadi kontroversi dalam pelaksanaannya.

Padahal pemenuhan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk warganya agar tercipta kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Senada dengan itu, kelengkapan fasilitas belajar juga merupakan nilai positif bagi peningkatan prestasi siswa. Analisis kebijakan dan pengawasan di kabupaten tersebut bisa dinilai masih kurang evaluasi, karena rendahnya tingkat evaluasi kebijakan dalam mengantisipasi perpindahan penduduk sehingga setiap ajaran baru pendaftar untuk masuk pada setiap jenjang sekolah tidak dapat diantisipasi yang akhirnya melambung tinggi.

Masalah pendidikan yang terjadi di desa Bandung Baru sebagaimana Fenomena pendidikan gratis tersebut bisa dinilai tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada di daerah lain yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan sebuah perencanaan sebelum kebijakan pendidikan gratis diterapkan, akibatnya sebahagian siswa akan terbengkalai dan angka putus sekolah bisa bertambah. Padahal tujuan dari pendidikan gratis adalah pemerataan pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah. Akan tetapi, jika realitasnya seperti ini, maka yang terjadi malah sebaliknya.

Implementasi dari konsep pendidikan gratis dari pemerintah beberapa fenomena yang terjadi di beberapa sekolah, secara kualitatif dapat dideskripsikan bahwa konsep tersebut dalam pelaksanaannya masih kurang. Baik dari segi kebijakan, evaluasi, dan perencanaan. Berarti dapat didefinisikan bahwa fungsi manajemen dalam perumusan tersebut bisa dinilai masih lemah baik realisasikan.

Fenomena tersebut berupa pertentangan antara kebijakan sekolah dengan aturan BOS, pertentangan tersebut berupa porsi pembiayaan guru honorer, seperti dalam aturan BOS, porsi untuk guru honorer hanya dijatah 20%, sedangkan kebijakan sekolah selama itu memberikan porsi 30% sehingga hal tersebut menjadi beban sekolah. selain dari itu, konsep pendidikan gratis juga dinilai masih tidak dipahami oleh beberapa sekolah. Bahkan hasil pendataan yang dilakukan pihak dinas kabupaten,

beberapa sekolah yang dinyatakan berhak menerima BOS, justru menolaknya.

Merupakan suatu tanda tanya, apa fenomena tersebut terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perencanaan sebelum suatu kebijakan diputuskan. Padahal implementasi kebijakan pendidikan gratis bermula pada tahun 2001, yang dinilai sudah cukup lama dan matang dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, kebijakan secara evaluasi dapat di tafsirkan dan digeneralisasikan dalam penerapan pendidikan gratis belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa masalah yang ada. Artinya evaluasi implementasi dan evaluasi kebijakan tidak berjalan. Sehubungan dengan itu, Selain dari masalah di atas, fenomena tersebut dapat di lihat di bawah ini.⁶³

Konsep kebijakan dan evaluasi program yang tidak sistematis dan terarah pada sebuah tujuan, akan berdampak pada kekacauan pelaksanaan. Sehingga kerugian tidak hanya terjadi pada kegiatan sekolah, namun berdampak pada prestasi siswa, maka keburukan pendidikan akan terus terjadi pada setiap saat. Ruang lingkup kebijakan baik dari segi, perumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan, semestinya menjadi landasan dalam melahirkan konsep-konsep baru. Untuk mengukur semua itu, maka metode evaluasi merupakan hal fundamental, dengan melihat input, dan output kebijakan. Dengan begitu pelaksana kebijakan tidak akan lari dari tujuan

⁶³ Eka Wahyuningsih Guru SMAN 1 Adiluwih, Wawancara Pribadi, 12 juli 2018

atau konsep-konsep yang telah dirumuskan, maka evaluasi dalam pelaksanaannya tetap harus berjalan seiring dengan konsep tersebut. Artinya harus tercipta suatu sinerjitas antara implementasi dengan evaluasi, sehingga problem solving terhadap apa yang terjadi dilapangan bisa cepat mendapatkan solusi melalui kebijakan, bukan top down.

Penolakan pendidikan gratis yang terjadi karena dinilai hanya sekedar label yang tidak sesuai dengan realitas. Kejadian tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa monitoring kebijakan dalam proses pelaksanaan pendidikan gratis g berjalan atau tidak sama sekali, sehingga pungli masih terus terjadi. Terjadinya berbagai penyimpangan pendidikan disebabkan karena, ketegasan, manajemen, peraturan, serta monitoring yang baik belum menjadi landasan yuridis. Artinya dalam aplikasinya masih bersifat setengah hati. Seakan-akan hanya sebagai pelepas tanggung jawab.

Terjadinya pungli di sekolah-sekolah merupakan fenomena yang serupa, bisa saja karena pola pemikiran “untung rugi” pada beberapa individu di sekolah masih diadopsi, atau perhatian kesejahteraan guru yang tidak maksimal, sehingga konsep dagang masih tercipta pada lingkungan tersebut. Sehingga substansi dari fenomena tersebut adalah perumusan kebijakan sebagai kunci untuk keluar dari masalah yang tidak bersifat seimbang “equilibrium”.

Pungli yang terjadi di di sekolah-sekolah dalam kaitannya dengan pendidikan karena hal tersebut telah menjadi budaya para pendidik.

Dengan demikian, untuk menghentikan badai yang berbentuk pungli di sekolah, agar siswa tidak menjadi bulan-bulanan guru, adalah perangkat hukum dari kebijakan yang mesti jelas dan diimplementasikan secara nyata. Akan tetapi, secara realitas, konsep pendidikan gratis di sekolahan yang ada di daerah Bandung Baru sangat tidak realistis, karena perda sebagai badan hukum dinilai belum ada. Berarti sebahagian pemerintah dalam pengembangan cara pendidikan masih kurang profesional, baik dari segi manajemen, perumusan perencanaan, kebijakan dan tujuan serta arah dari pendidikan nasional juga masih belum diadopsi dengan baik.

Senada dengan hal sebelumnya, sebagaimana di atas, konsep pendidikan gratis dengan berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia secara umum, dan Munculnya persepsi masyarakat yang bersifat negatif terhadap pendidikan gratis, bisa dinilai karena sosialisasi dari konsep tersebut yang tidak jalan, ataukah penglibatan masyarakat “aspirasi” dalam perumusan kebijakan tidak terakomodir. Sehingga pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan gratis ambigu.

Dengan begitu banyak konflik dalam pendidikan gratis yang di berikan pemerintah untuk masyarakat, ini belum lah cukup atau memadai dan tepat sasaran sehingga anak-anak yang ada di Desa Bandung Baru sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah desa. Fenomena yang seperti inilah pemerintah desa bandung baru mengeluarkan suatu program kebijakan pendidikan gratis untuk anak-anak desa Bandung Baru agar

mereka tetap mengenyam pendidikan sebagaimana dengan anak-anak yang lainnya, yaitu dengan membiayai mereka sekolah sampai masa pendidikan nya selesai .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan yang di keluarkan aparat desa Bandung Baru yaitu kepala pekon di bidang pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan dan mengurangi angka putus sekolah yang ada di desa bandung baru. Karena kebijakan pendidikan sangat di perlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat di capai secara berkelanjutan, dan upaya kepala pekon desa Bandung Baru dalam mengembangkan program pendidikan di bidang pendidikan yaitu memberikan biaya pendidikan gratis bagi anak yang kurang mampu dengan menggunakan sebagian dana desa agar membantu peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan kejenjang pendidikan tingkat tinggi.
2. Melalui Program kebijakan pendidikan gratis dari pemerintah desa Bandung Baru ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program ini juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka

partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

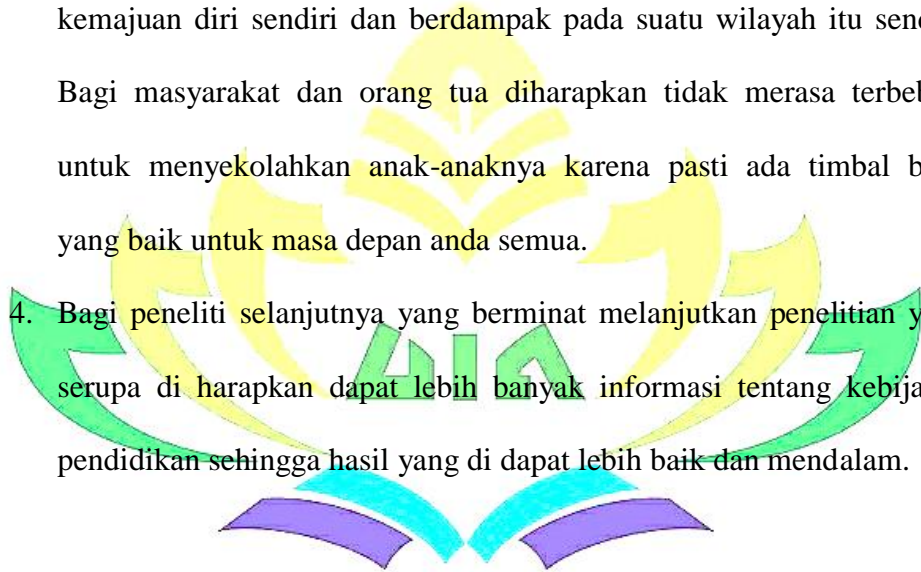
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di uraikan di atas, sebagai penutup dalam skripsi ini di ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala pekon bandung baru di harapkan dapay melanjutkan program bantuan untuk anak yang putus sekolah serta dapat mengevaluasi program. Kkepala pekon Bandung Baru dapat dapat membuat program pendidikan lanjutan karena karen program tersebut di anggap dapat memberikan bantuan layana n pendidikan dan akses pendidikan yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan keringan biaya serta siswa dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Kebijakan pendidikan di desa Bandung Baru dapat memberikan bantuan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusian yang berdampak pada kemajuan desa Bandung Baru melalui pendidikan.
2. Pihak sekolah diharapkan dapat mengelola sumber dana yang ada dengan sebaik mungkin. Sekolah dapat bekerja sama dengan komite sekolah serta berkreastifitas untuk dapat bersama-sama memajukan sekolahnya tidak hanya mengandalkan dan bergantung dana dari pemerintah saja, sekolah dan komite dapat bermusyawarah untuk membicarakan kebutuhan anggaran sekolah melalui rapat komite agar

kendala dapat di hadapi bersama.sekolah dan komite harus dapat bersinergi untuk dapat memajukan sekolahnya dan berusaha mandiri mengelola manajemen sekolah untuk dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan mutu pendidikan.

3. Masyarakat dan orang tua itu hendaknya lebih memahami pentingnya pendidikan, bukan hanya biaya yang murah. Jangan selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, bersikaplah mandiri demi kemajuan diri sendiri dan berdampak pada suatu wilayah itu sendiri. Bagi masyarakat dan orang tua diharapkan tidak merasa terbebani untuk menyekolahkan anak-anaknya karena pasti ada timbal balik yang baik untuk masa depan anda semua.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian yang serupa di harapkan dapat lebih banyak informasi tentang kebijakan pendidikan sehingga hasil yang di dapat lebih baik dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

(KBBI) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Abdul Majid, *strategi pembelajaran*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013

Ara Hidayat, Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta, Kaukaba, 2013

Budi Winarno, *kebijakan publik: teori dan proses*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *metode penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Diding Nurdin, Imam Sibaweh, *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Edgar C. Morphet, *The Economics And Financing Of Education*. New Jersey: Prentice Hall Inc., Englewood Cliff, 1983

Edward Sallis, *Total Quality Management In Education*. London: Kogan Page Limited, 2002

Fatoni, Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 2011.

Hamzah Ahmad, *Kamus Bahasa Indonesia* Surabaya: Fajar Mulia, 1996

J.L. Pressman and Wilddavsky, *implementation*, Barkley And Los Angeles, University Of California Pres, 1973

Kartini, Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik Dan Sugesti*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2003

Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penajagan Politik* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Nur Kholis, *Kiat Sukses Jadi Praktisi Pendidikan*. Yogyakarta: PALEM, 2004

Nurul Ulfatin Dan Teguh Triwiyanto, *manajemen sumber daya manusia bidang pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985

Prastya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian* Jakarta, Setawan Pers, 1999

- Rachmadi Usman, *pilihan penyelesaian sengketa peradilan*. Citra Aditya Bakti, 2003
- Ralf Dahrendrof, dalam Margaret M. Polma, 2000. *Sosiologi Kontemporer*, 2000
- Rian nugroho, *kebijakan pendidikan yang unggul*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Robby I Chandra, *Konflik dlm kehidupan sehari-hari* Yogyakarta: Kanisius, 1992
Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu,. 2007.
- Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. *Sengketa dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Indonesian Center For Enviromental Law, 1977
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 1998
- Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Suryobroto, B, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sutrisno Hadi, *metodelogi research*, jilid 1, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986
- Syarifudin, *efektivitas kebijakan pendidikan: konsep, strategi, dan aplikas kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Jakarta. Rineka Cipta, 2008
- William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gadjahmada University, 2000
- Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta :Graha Ilmu ,2007